

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Brebes (Studi Empiris Kantor UPPD Brebes)

Ismi Nur Kholifah¹Hilda Kumala Wulandari²Dumadi³Yenny Ernitawati⁴
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3,4}

Email:

nurkholifahismi@gmail.com¹hilda060791@gmail.com²dumadi_adi@gmail.com³yennyeritawati@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah brebes. Penelitian ini mengambil studi empiris di Kabupaten Brebes periode 2016-2020. Hal ini dikarenakan pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Populasi pada penelitian ini disajikan dalam adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kantor UPPD Brebes tahun 2016-2020. Sampel dari penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh sehingga sampel penelitian ini keseluruhan laporan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat pengujian menggunakan SPSS versi 25 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, 2) jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, 3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan ,4) jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci:Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, PertumbuhanEkonomi, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that influence motor vehicle tax revenue in the Brebes area. This research takes an empirical study in Brebes Regency for the 2016-2020 period. This is because taxes are mandatory contributions collected by the government from the public (taxpayers) to cover routine state expenditures and development costs without remuneration that can be appointed directly. The population in this study presented in is a report on the realization of motor vehicle tax receipts at the UPPD Brebes office in 2016-2020. The sample of this study uses the saturated sampling method so that the sample of this study reports the total number of motor vehicles, population, economic growth and motor vehicle tax revenues for the 2016-2020 period. This study uses secondary data. The test tool uses SPSS version 25 . The results of this study indicate that: 1) the number of motorized vehicles has a significant effect on motor vehicle tax revenues, 2) the population has no significant effect on motor vehicle tax revenues, 3) economic growth has a significant effect on motor vehicle tax revenues and ,4) the number of motorized vehicles, population, and economic growth have a significant effect simultaneously on motor vehicle tax revenues.

Keywords: Number of Motorized Vehicles, Total Population, Economic Growth, Motor Vehicle Tax Revenue



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHALUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Di Brebes, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi dan bagian dari pajak wilayah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada UU No. 1 keputusan nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenal dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang atas dipungut kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknis berupa sepeda motor atau peralatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan utama daerah yang sangat potensial.

Dalam hal ini, pvmweintah daerah sangat prihatin dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah, dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis daerah pada biro pajak Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang berada di wilayah Brebes. Dengan SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Brebes meningkatkan pelayanan perpajakan dengan menawarkan layanan *samsat online* kepada pemilik mobil yang ingin membayar pajak dan memperpanjang STNK. Selain itu, *Mobile samsat* juga dapat digunakan untuk melayani masyarakat atau desa terpencil untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan utama daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perpajakan adalah iuran wajib kepada orang atau badan yang bersifat wajib yang berdasarkan undang-undang, tidak menerima imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat dalam jumlah besar. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang yang mewajibkan individu tertentu untuk menyerahkan kendali atas beberapa sumber daya kepada pemerintah. Keteantuan perundang-ndangan memuat kriteria yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (Prawita, 2018). Pajak kendaraan bermotor ditujukan untuk pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai sarana pengangkut orang atau barang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan banyak kesempatan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat atau peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan pengelolaan hubungan keuangan yang adil, serasi dan akuntabel sesuai dengan UUD 1945. Salah satu pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 jenis-jenis pajak kabupaten/kota antara lain : a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak galian kelas, g) pajak parkir.

Masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup besar di Jawa Tengah, antara lain di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah bekerja sama dengan PKK meluncurkan sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Pendopo Bupati Brebes. Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto menjelaskan, kerja sama dengan PKK pada 2019 telah membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan pajak yang berhasil disetor sebesar Rp 1,5 miliar pada tahun 2020. Pihak memperluas

kerja sama, semula hanya 6 kabupaten, ditambah 12 kabupaten/kota, masing-masing kabupaten menerima 2.000 surat pemberitahuan pajak.

Menyadari bahwa tahun ini kami bekerja sama dengan 18 kabupaten, katanya. 550 anggota PKK se-Kabupaten Brebes dan Tegal mengikuti bakti sosial yang dipimpin Ketua TP PKK Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bupati Brebes Hj Idza Priyanti S.E M.H, wakil bupati Brebes Narjo S.H M.H, TP PKK Kabupaten Brebes Ny Sri Legiastuti Narjo, ketua Dekranasda Brebes Drs. H Warsidin M.H dan ketua TP PKK Batang Uni Kuslantasih. Dilibatkannya Tim Penggerak PKK dalam sosialisasi tersebut sangat masuk akal, sebagai Organisasi yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat, PKK dianggap sangat cocok untuk membantu dalam urusan penyadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan. Untuk itu pada program tadi semua anggota TP PKK pada diberikan penerangan apa itu pajak tunggangan, apa saja keuntungannya dan acara yang sedang dijalankan oleh Samsat se Jawa Tengahwaktu itu. Dengan asa tertentu selesainya rendezvous tadi mereka akan bisa menyebutkan pada masyarakat.

Berdasarkan data yang terdapat buat Kabupaten Brebes pada Tahun 2020 saja Januari sampai Februari setidaknya terdapat tunggakan 4,12 milyar berdasarkan 16 ribuobyek pajak dimana buat tunggakan diatas 1 tahun terdapat Rp 42,61 Milyar berdasarkan 114 ribu obyek (38.5%). Sementara buat Kabupaten Tegal Januari sampai Februari 2020 sedikitnya terdapat tunggakan sebanyak Rp 4,04 Milyar berdasarkan 14 ribu objek, dan tunggakan diatas satu tahun terdapat Rp 45,31 Milyar berdasarkan 115 obyek. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakinkan bahwa pendapatan yang didapatkan berdasarkan Pajak Kendaraan seluruhnya buat pembangunan Daerah, terutama pada wilayah berdari pajak itu diperoleh. Untuk itu apabila pajak itu nir dibayarkan maka tentunya pembangunan infrastruktur pula akan tersendat. Selain mensosialisasikan kepatuhan pajak tunggakan pada kesempatan tadi pula dipakai Ganjar Pranowo buat meminta warga permanen hening pada menghadapi perseteruan virus corona yang sedang marak diberitakan. Ganjar meminta supaya warga nir tidak perlu panik dan melakukan hal hal konyol seperti memborong barang barang kebutuhan pokok.

Senada menggunakan yang disampaikan suaminya, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Ny Siti Atikoh Ganjar Pranowo juga mengajak semua Kader PKK supaya terus melakukan training terhadap semua masyarakat buat bisa menjalankan hayati sehat. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes Ny. Sri Legiastuti Narjo mengungkapkan jajarannya akan selalu siap membantu mensukseskan acara pemerintah termasuk menggugah pencerahan masyarakat buat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Atikoh Ganjar Pranowo mengakui, memang diharapkan kesabaran dan pencerahan pada membantu pemerintah mengoptimalkan pajak kendaraan. Tetapi beliau optimistis kader PKK mempunyai mental bertenaga misalnya itu. Terbukti, dalam tahun 2019 kemudian ketika kolaborasi menggunakan Bapenda diujicobakan dalam enam kabupaten, hasilnya relatif efektif. Kader PKK itu grassroot yang eksklusif ke masyarakat. Jadi, waktu mereka mengamoanyekan pembayaran pajak jua reatif efektif. Banyak kendala akan tetapi menggunakan pendekatan humanis, dengan bahasa yang baik, barrier bisa dihapus.

Samsat Brebes baru sanggup menarik pajak tunggangan bermotor sampai pekan kemudian sebanyaknya Rp 108 milyar menurut sasaran perolehan sebanyak Rp 127,5 milyar. Dengan istilah lain, waktu itu terdapat tunggakan pajak yang belum terbayar pada Samsat Brebes lebih kurang Rp 19,5 milyar. Kasi pajak Samsat Brebes, Tiara Rizkalia mengatakan, jumlah tunggakan nRp 19,5 milyar tadi nir hanya tunggakan dalam tahun 2019 ini saja melainkan akumulasi menurut tahun-tahun sebelumnya. Kami permanen mengupayakan

supaya tunggakan tadi bisa terbayar dalam harus pajak pemilik tunggangan buat mengejar para penunggak pajak tunggakan tadi, pihak sudah mengupayakan aneka macam cara. Diantaranya menciptakan tim Saber Pajak atau Satgas Tunggakan Pajak yang terdiri menurut 12 orang. Mereka merupakan pihak ketiga yang dipekerjakan khusus menagih pajak kendaraan bermotor. Setiap satu orang anggota Saber Pajak, ditargetkan bisa menagih 10 harus pajak per harinya. Kita lakukan pendekatan dan sedikit paksaan, karenanya memang kewajiban. Kalau tunggangan telah ganti pemilik, kita pribadi lakukan pemblokiran, jelasnya. Cara lain, selanjutnya yaitu menggunakan menggelar razia tunggangan bermotor berafiliasi menggunakan pihak kepolisian. Dalam razia itu, Samsat Brebes membuka pelayanan pribadi buat menjaring tunggangan yang menunggak pajak. Mesti telah dilakukan aneka macam upaya buat menarik pajak tunggangan bermotor, aneka macam hambatan kerap dialami. Sehingga pajak tunggangan permanen tidak terbayar.

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori kewajiban mutlak (Teori Bakti) menggunakan bahwasannya “Negara memiliki hak absolut supaya memungut pajak dari masyarakatnya”. Didasari warga bahwa membayar pajak merupakan sebuah keharusan menjadi perindikasi baktinya dalam negara supaya pemerintahan negara berjalan baik dan lancar. Berdasarkan teori tersebut dasar anggaran pajak masih ada dalam interaksi antar warga dan negara yang negara memiliki hak memungut pajak sedangkan warga berkewajiban membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Undang-undang No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau dominasi tunggangan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua tunggangan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipakai pada seluruh jenis jalan darat dan digerakan sang alat-alat teknik berupa motor atau alat-alat lainnya yang berfungsi buat mengganti suatu asal daya tenaga eksklusif sebagai energi mobilitas tunggangan bermotor yang bersangkutan, termasuk indera-indera berat dan indera-indera berat yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan galat suatu jenis pajak daerah. Sebagai galat suatu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi output antara Pemerintah Kabupaten/kota mendapat bagi output PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi mendapat 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan pada Kabupaten/Kota, dialokasikan buat pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan peningkatan kapital dan wahan transportasi umum. Subjek PKB merupakan orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk BPS Statistik Indonesia (2013) memperlihatkan penduduk merupakan seluruh orang yang bertempat tinggal pada daerah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang bertempat tinggal kurang menurut 6 bulan namun bertujuan buat menetap. Penduduk yang berada atau tinggal pada suatu wilayah wajib mengikuti peraturan wilayah tadi termasuk pada hal peraturan pembayaran pajak yang dipakai buat menompang pembangunan wilayah mereka tinggal. Data jumlah penduduk diukur pada satuan orang.

Sensus penduduk tahun 2010, BPS melakukan pencacahan penduduk menggunakan konsep “*de jure*” atau konsep “dimana seorang berada dalam ketika pencacahan”. Untuk penduduk yang berdomisili tetap, dicacah dimana mereka umumnya berdomisili. Penduduk

yang sedang berjalan 6 bulan atau lebih, atau yang sudah berada dalam suatu lokasi tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal dalam ketika pencacahan. Penduduk yang menempati tempat rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap (BPS, 2010).

Jumlah Kendaraan Bermotor

Undang-undang No 30 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mendefinisikan tunggangan bermotor merupakan setiap tunggangan yang digerakkan sang alat-alat mekanik berupa selain mesin tunggangan yang berjalan pada atas rel. Kendaraan Bermotor merupakan setiap tunggangan yang mempergunakan energi mesin menjadi pada dasarnya buat beranjak atau berjalan, tunggangan ini umumnya digunakan buat pengangkutan orang dan barang atau menjadi indera transportasi akan namun tunggangan tadi bukan yang berjalan pada atas rel misalnya kereta api. Kendaraan bermotor mempunyai roda, dan umumnya berjalan pada atas jalanan. Jenis-jenis tunggangan off-road, truk ringan, hingga truk berat. Klarifikasi tunggangan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Data jumlah kendaraan bermotor diukur dalam satuan unit.

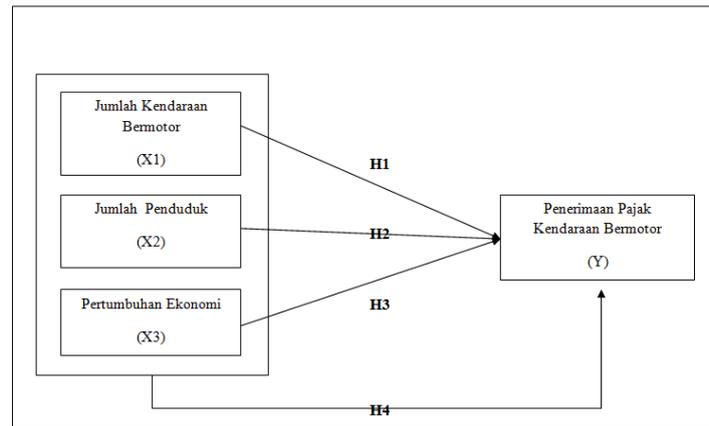
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan ditinjau dan diukur menggunakan cara membandingkan komponen yang bisa mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa sekarang dan periode sebelumnya. Komponen yang dipakai buat mengukur pertumbuhan ekonomi merupakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam buku Ekonomi Makro (2012) karya Joko Utoro disebutkan, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas pada perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi pada warga bertambah dan kemakmuran warga semakin tinggi pada jangka panjang. Sedangkan dari buku makro ekonomi Teori pengantar (2012) karya Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas pada perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi pada masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prawita, 2018). Waluyo (2007) menyebutkan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayain pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 aya (1), yaitu: "Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai uatang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya diantaranya yaitu variabel bebas yang terdiri dari jumlah kendaraan bermotor (X1), jumlah penduduk (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) dengan variabel terikat yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y). Dalam penelitian ini, alur sederhana tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H1:Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

H2:Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

H3 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

H4:Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Wilayah Brebes Tahun 2016-2020”, Penelitian ini mengkaji di UPPD Brebes. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2016-2020, dan data penelitian diambil di Kantor UPPD Brebes. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) yang dikatakan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja dapat berupa atribut, sifat atau nilai dari orang serta dapat berupa objek atau kegiatan yang mempunyai variasitertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel Penelitian

1. *Dependent Variable* (Variabel Terikat). Variabel dependen adalah variabel penelitian yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel lain yang dinamakan variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor di beri simbol (Y). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian.
2. *Independent Variable* (Variabel Bebas). Variabel independen adalah variabel penelitian yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain yang dinamakan variabel dependen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Variabel independen disebut juga variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini

menggunakan jumlah kendaraan bermotor yang diberi simbol X1, jumlah penduduk yang diberi simbol X2, dan pertumbuhan ekonomi diberi simbol X3.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berguna meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu dimana data yang akan digunakan diteliti dalam bentuk angka-angka melalui alat uji perhitungan statistik. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak kedua, artinya data penelitian ini diperoleh serta dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020. Metode pengumpulan data menggunakan metode *nonprobability sampling method* yaitu metode pengambilan sampel yang memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk pengambilan sampel. Alat pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi analisis data statistik atau disebut dengan *Statistical Package For Sosial Science (SPSS)*. Program SPSS ini menggunakan SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini disajikan dalam adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kantor UPPD Brebes tahun 2016-2020. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel (*nonprobability sampling*) yang memberi setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk pengambilan sampel. Artinya, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh, dimana sampel diambil dari keseluruhan anggota populasi. Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah keseluruhan laporan jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2016-2020 sebesar 60 sampel. Data tersebut merupakan data perbulan periode 2016-2020.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji kelayakan model ini juga dikenal dengan uji F. Uji F pada hakikatnya mengukur efektifitas model atau mengukur berapa persen variasi Y yang bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini toleransi kesalahan dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$.

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,023	3	5,674	55,117	.000 ^b
	Residual	5,765	56	0,103		
	Total	22,788	59			
a. Dependent Variable: PPKB						
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk						

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Pada tabel diatas hasil uji F (Simultan) dapat dilihat nilai *sig* harus lebih kecil dari 0,05. Sesuai hasil uji F nilai *sig* untuk variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi nilainya sebesar 0,000 yang artinya *sig* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor diterima.

Uji Statistik t (Persial)

Uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

- (a) Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
- (b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Hasil Uji Statistik t (Persial)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,014	0,045		0,307	0,760		
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0,466	0,059	0,577	7,835	0,000	0,833	1,201
	Jumlah Penduduk	0,018	0,066	0,023	0,275	0,785	0,655	1,527
	Pertumbuhan Ekonomi	0,613	0,079	0,593	7,719	0,000	0,767	1,304

a. Dependent Variable: PPKB

Sumber: Hasil analisa menggunakan SPSS 25

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Jumlah Kendaraan Bermotor (X1) adalah signifikan dengan t-hitung sebesar 7,835 dan nilai *Sig.* = 0.000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Jumlah Kendaraan Bermotor (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)" **diterima**. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Prawita (2018) yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah Penduduk (X2) adalah signifikan dengan t-hitung sebesar 0,275 dan nilai *Sig.* = 0.785 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)" **ditolak**. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dwi Ajeng (2021) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan Ekonomi (X3) adalah signifikan dengan t-hitung sebesar 7,719 dan nilai *Sig.* = 0.000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "Pertumbuhan Ekonomi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)" **diterima**. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Maulydia Mery Agustin (2017) menghasilkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Brebes pada periode 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software* SPSS versi 25, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil uji F dapat dinyatakan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel independen yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ini diartikan bahwa penurunan atau peningkatan jumlah penduduk di Brebes akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uji t dapat diartikan bahwa secara parsial variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan cenderung meningkat.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan melakukan analisis dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi tentang kondisi variabel bebas yang ada pada penelitian ini, karena pada penelitian ini terbukti bahwa ke tiga variabel yang diteliti yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah bisa mengontrol ke tiga variabel tersebut agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi target yang diharapkan, dan juga dengan penelitian ini pemerintah akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengambil keputusan dan kebijakan kedepannya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah Brebes hendaknya meningkatkan kinerjanya, dengan cara memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat atau wajib pajak agar wajib pajak nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dengan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan lokasi penelitian atau variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, D. K. A. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019. Institut Pertanian Bogor Jawa Barat Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (2010). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan ahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.

- Badan Pusat Statistik (2013). Statistik Indonesia Tahun 2013. Badan Statistik Indonesia. Jakarta.
- Febriati. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos 7(2): 165-185.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra D. (2015). 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Nagan Raya Periode 2008-2012. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
- Mery, M. A (2017). Analisis Pengaruh Sektor Transportasi dalam Produk Domestik Bruto (PDRB). Jumlah Penduduk dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2015. Universitas Brawijaya.
- Prawita, R. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. Universitas Islam Indonesia.
- Prawita. (2008). Undang-Undangan tentang kriteria pemungutan pajak tersebut.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B. alfa.
- UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Andalas.
- UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan